

# Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

95-108

© The Author(s) 2023



Volume 20.1 Januari-Juni 2023i

Publikasi online: 24 Agustus 2023

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

DOI: 10.36451/jisip.v20i1.13

**Muhammad Falih Iqbal<sup>1</sup>**  **Sugeng Harianto<sup>2</sup>**  **dan Pambudi Handoyo<sup>3</sup>** 

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

## **Corresponding Author:**

Muhammad Falih Iqbal, Jl. Ketintang, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia.

E-mail: [muhammadfalih.21022@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadfalih.21022@mhs.unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Studi dan diskusi mengenai marginalisasi perempuan masih banyak berfokus pada bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi gender. Artikel berupa hasil kajian literatur yang berusaha mengisi kekosongan studi mengenai bagaimana transformasi peran perempuan desa sebagai bentuk perlawanan dalam belenggu budaya patriarki yang masih kental. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi transformasi peran perempuan desa pada beberapa aspek yang masih terbelenggu oleh budaya patriarki. Dokumen kepustakaan yang digunakan berupa buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan. Hasil kajian menjelaskan kedudukan dan peran perempuan di dalam kehidupan masyarakat desa telah mengalami perubahan pada beberapa aspek, yakni politik, pendidikan, ekonomi dan keluarga, maupun sosial dan budaya. Kedudukan dan peran perempuan desa tidak dapat dimarginalisasi dengan kekuasaan dan dominasi laki-laki. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntun perempuan menuju derajat yang setara di dalam

sistem sosial masyarakat desa, meskipun faktor ekonomi dan budaya masih menghambat mobilitas sosial perempuan di desa. Temuan itu sejalan dengan hakikat perempuan sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk bebas berekspresi, berpendapat, mengembangkan potensi, dan lain-lain.

### **Kata Kunci**

Peran; Perempuan Desa, Patriarki

### **Abstract**

*The study and discussion on the marginalization of women are still mostly concerned with the forms of gender inequality and discrimination. The article is the result of the literature study that seeks to fill in the gaps in studies on how to transform the role of village women as a form of resistance in the shackles of a patriarchal culture that is still thick. The purpose of the study is to identify the transformation of the role of rural women in several aspects that are still shackled by the patriarchal culture. Library documents are books, journals, theses, and relevant theses. The results of the study explain that the position and role of women in the life of village communities have undergone changes in several aspects, namely politics, education, economy and family, as well as social and culture. The position and role of village women cannot be marginalized by the power and domination of men. Developments in science and technology have led women to equal degrees in the social system of rural communities, although economic and cultural factors still hinder women's social mobility in villages. This finding is in line with the nature of women as social beings who have the right to free expression, opinion, develop potential, and so on.*

### **Keywords**

*Patriarchy; Role; Village Women*

### **Pendahuluan**

Dewasa ini, permasalahan gender yang mengacu pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan daripada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki menjadi isu yang penting untuk dikaji. Kedudukan dan peran perempuan dalam sistem sosial masih sering termarginalkan oleh tradisi dan budaya yang melekat erat di dalam pola pikir dan pengalaman masyarakat desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan yang lebih rendah dengan

persentase 69,19 pada tahun 2020 daripada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki yang telah mencapai persentase 75,98 pada tahun 2020 (KPPPA, 2021). Dapat kita yakini bahwa patriarki merupakan penghalang mobilitas sosial perempuan di dalam sistem sosial masyarakat. Patriarki sebagai kutukan yang tak pernah diharapkan oleh seorang perempuan. Kedudukan dan fungsi sosial mereka dikubur sedalam-dalamnya serta hak-hak dirinya sebagai seorang manusia tidak diberikan secara bebas. Hal ini akan memperburuk fungsi dan peran perempuan di dalam kehidupan masyarakat desa yang cenderung menganut pada budaya tradisional.

Namun, kita tidak bisa menutup mata tentang seluruh perubahan dan keberhasilan pembangunan yang tentu tidak terlepas dari peran perempuan. Keterlibatan peran perempuan kini mulai tampak di permukaan. Kedudukan dan fungsi sosial perempuan mulai diakui dan diyakini keberadaannya. Hal ini tentu tidak terlepas dari perjuangan para feminis yang terus berupaya untuk mengangkat derajat perempuan di mata masyarakat. Perempuan juga telah mematahkan stigma masyarakat mengenai ketidakmampuannya dalam menjadi seorang pemimpin. Beberapa perempuan telah berhasil memasuki ranah yang dikuasai laki-laki, salah satunya dalam hal politik dan kepemimpinan (Fitriani, 2015). Perubahan peran baru perempuan yang dikaitkan dengan aktivitas politik mengisyaratkan bahwa diskusi-diskusi mengenai perempuan merupakan hal penting dalam menjelaskan arah politik perempuan itu sendiri (Patty et al., 2022). Sebab dalam pandangan Bone dan Ranney, arah politik perempuan di daerah tertinggal dengan pendidikan yang rendah masih ditentukan oleh kaum laki-laki.

Kepemimpinan seorang perempuan telah menjadi bukti bahwa kedudukan dan peran seorang perempuan bukan hanya pada ranah domestik, seperti mencuci, memasak, menyapu, dan lain-lain. Dalam penelitiannya, Utaminingsih (et al., 2020) menjelaskan tiga faktor keberhasilan kepemimpinan perempuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di desa, yaitu (1) keinginan kuat perempuan untuk membangun masyarakat desa, (2) dukungan dan kerja sama antar perangkat desa, dan (3) perencanaan dan pelaksanaan program yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat desa. Kedudukan dan peran perempuan juga penting dalam ranah organisasi dan pemerintahan desa. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Bab 5 Pasal 58 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa pada Bab 4 Pasal 10 ayat 2k yang juga mengikutsertakan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa menuju keberhasilan.

Namun, berdasarkan data BPS (2022) keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di desa masih terbilang rendah dengan persentase sebesar 5,16% kepala desa berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021, sedangkan sekretaris desa berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 12,56% pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa kontribusi perempuan dalam pemerintahan masih terbilang minim. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yakni persepsi masyarakat, sistem sosial-politik, bias agama, dan budaya (Kiftiyah, 2019). Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang merujuk pada pengarusutamaan gender akan menampakkan kedudukan dan peran penting perempuan yang seringkali ditenggelamkan di dalam sistem sosial masyarakat desa.

Sejenak melangkah ke arah pendidikan yang juga merupakan faktor penting dalam menentukan

keberhasilan perubahan dan pembangunan desa melalui kualitas sumber daya manusia. Pendidikan bagi perempuan seringkali dianggap tidak penting oleh masyarakat desa yang masih berkiblat pada budaya patriarki. Sosialisasi dan budaya tradisional menempatkan kedudukan perempuan di lapisan bawah. Peran perempuan dianggap hanya sebatas memenuhi kebutuhan suami dan anak. Hal ini yang menyebabkan perempuan kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dalam penelitian Incing (et al., 2013) mengungkapkan beberapa faktor penyebab kesenjangan pendidikan perempuan di masyarakat desa, antara lain (1) persepsi masyarakat yang menempatkan perempuan pada ranah domestik, (2) minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, (3) keselamatan perempuan yang masih bergantung pada pengawasan orang tua, (4) ekonomi masyarakat yang rendah, dan (5) fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Beberapa hal tersebut akan menyulitkan perempuan desa untuk memobilisasi pendidikan yang layak. Konstruksi sosial yang menempatkan kedudukan dan peran di pinggiran menjadikan perempuan seringkali tidak mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kesenjangan pendidikan oleh perempuan desa akan menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak lemahnya pembangunan desa.

Lebih jauh melihat peran perempuan desa bukan hanya sebagai pekerja rumah tangga, istri, ataupun seorang ibu, tetapi perempuan desa juga memiliki peran dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Dalam penelitian Mustangin (2017) menjelaskan bahwa perempuan di desa Pagerwangi juga terlibat dalam rangka pengelolaan lingkungan untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim yang dilakukan melalui beberapa program, antara lain pendaurulangan sampah, pembinaan perempuan, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada perempuan sekitar. Melalui implementasi program-program pelestarian lingkungan oleh masyarakat di desa Pagerwangi menjelaskan bahwa perempuan desa juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim.

Perempuan desa juga memiliki peran penting dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Realitanya, perempuan selalu diidentikan dengan urusan domestik, seperti menyapu, mencuci, memasak, merawat anak, mengurus suami, dan lainnya (Iqbal & Harianto, 2022). Namun, pergeseran kedudukan dan peran perempuan tidak lagi terasa kaku. Perempuan desa dapat merasakan bekerja di luar ranah domestik, seperti menjadi nelayan, petani, pengrajin, dan lain-lain. Diskusi ini menimbulkan perdebatan mengenai peran ganda yang dimiliki oleh seorang perempuan sebab pekerjaan di ranah publik tidak menghapuskan tugas domestik seorang perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam ranah publik menandakan bahwa budaya patriarki dapat direduksi secara perlahan, meskipun dalam ranah publik, perempuan seringkali mendapatkan tindakan diskriminatif.

Perempuan bukan hanya pendamping dan pelengkap laki-laki, tetapi sudah menduduki kesetaraan di dalam tingkat tertentu. Peran perempuan desa yang dianggap termarginalkan telah dibantah oleh beberapa penelitian terdahulu. Manembu (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan desa memiliki partisipasi dan keterlibatan dalam pembangunan desa yang baik melalui kelompok keswadayaan. Namun, dalam penelitiannya juga mengungkapkan beberapa hambatan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa, antara lain stigma masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan dan faktor pendidikan serta pengalaman yang belum cukup memadai.

Selanjutnya, dalam penelitian Wula & Anggraini (2022) dikemukakan bahwa perempuan desa juga berperan dalam bidang sosial melalui pemanfaatan organisasi desa, seperti PKK, BUMDES, dan arisan kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas, wawasan, kreatifitas, pengetahuan, dan peran perempuan dalam pengembangan desa. Selain itu, perempuan desa memiliki peran penting dalam melestarikan adat dan budaya serta kesejahteraan sosial melalui kontribusinya dalam pelaksanaan tradisi masyarakat di desa. Namun, peran perempuan di dalam hubungan sosial-budaya masyarakat desa masih cenderung termarginalkan sebagai pendamping dan pelengkap. Hal ini menandakan bahwa budaya patriarki di desa dapat direduksi, tetapi tidak dengan mudah untuk dihilangkan.

Berdasarkan hasil uraian diskusi latar belakang di atas, dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki, perempuan bisanya masih membelenggu beberapa aspek kehidupan sosial. Namun, data menunjukkan adanya pergeseran kedudukan dan peran perempuan yang semakin diakui dan mulai tampak di permukaan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana transformasi peran perempuan desa yang masih dalam belenggu budaya patriarki. Kerangka analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan kedudukan dan peran perempuan desa pada aspek politik; perubahan kedudukan dan peran perempuan desa pada aspek pendidikan; perubahan kedudukan dan peran perempuan desa pada aspek ekonomi dan keluarga; serta perubahan kedudukan dan peran perempuan desa pada aspek sosial dan budaya.

## Metode

Sebagai artikel tinjauan ilmiah, pendekatan kajian bersifat deskriptif berdasarkan data yang sudah tersedia baik, berupa hasil penelitian, dokumen kebijakan metode tinjauan literatur (*literature review*). Dengan metode ini dilakukan pengolahan data dan pengutipan sumber referensi untuk ditampilkan bukti-bukti temuan, kemudian diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk menarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Kajian ini dilakukan penelaahan terhadap 20-30 sumber data yang berupa buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang relevan dengan tujuan kajian. Beberapa sumber rujukan digunakan untuk memperkuat argumen dan temuan data agar hasil kajian dapat diyakini kredibilitasnya. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Model analisis data ini dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga data dirasa cukup. Teknik analisis data Miles dan Huberman terdapat dua tahap, yakni (1) analisis pada saat pengumpulan data untuk menentukan inti dari fokus penelitian melalui sumber-sumber yang dihimpun sesuai dengan peta penelitian, dan (2) setelah data terkumpul, temuan data dihubungkan dan dianalisis. Aktivitas analisis data model Miles dan Huberman, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Kedudukan dan Peran Perempuan Desa pada Aspek Politik

Sistem kerja patriarki telah diketahui bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Hal ini berdampak pada stigma masyarakat mengenai ketidakmampuan perempuan dalam hal kepemimpinan. Oleh karena itu, pimpinan negara, kota, desa, maupun keluarga sering diambil alih oleh para laki-laki. Perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah wilayah tertentu karena perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah, emosional, dan irasional. Realita tersebut diungkapkan dalam penelitian Darmi (2016) yang menjelaskan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam aspek pemerintahan desa menyebabkan rendahnya peran perempuan dalam pembangunan desa seperti pengelolaan keuangan. Faktor penyebab rendahnya keterlibatan perempuan dalam aspek politik dan pemerintahan desa, yakni (1) realisasi program pembangunan desa belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai sasaran pembangunan yang diprioritaskan pada keadilan gender, (2) persepsi masyarakat mengenai lingkup kerja perempuan yang hanya pada urusan domestik atau rumah tangga, dan (3) rendahnya kapasitas diri perempuan dan kelembagaan PKK, Posyandu, Dasawisma, dan organisasi lain yang menaungi para perempuan.

Kepribadian dan kapasitas perempuan yang cenderung irasional dan emosional masih diragukan untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Hal itu diungkapkan dalam penelitian Emanratu (2020) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan di desa masih membawa atribut natural perempuan yang sensitif dan emosional sehingga kurangnya keberhasilan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat selama periode kepemimpinan. Terlebih pemilihan kepala desa tidak didasari atas kemauan bersama, melainkan berdasarkan agenda kepentingan beberapa pihak yang menyebabkan program pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan optimal dan justru terkesan buruk. Ketidaksiapan dan ketidaktepatan dalam kepemimpinan perempuan ini berimplikasi semakin kuatnya stigma masyarakat mengenai kemampuan perempuan menjadi seorang pemimpin.

Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kedudukan dan peran perempuan desa dalam aspek politik dan kepemimpinan telah bergeser menjadi lebih berharga. Beberapa perempuan telah berhasil mematahkan stigma masyarakat mengenai kepemimpinan seorang perempuan dibuktikan dengan keberhasilan dalam menjalankan program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Azmi (2021) di Desa Maliki Air, Kota Sungai Penuh, Jambi. Kepala desa perempuan di Desa Maliki Air menjadi panutan masyarakat setempat dengan kepribadian yang kreatif dan cerdas dalam menjalankan program-program pemerintahan desa. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya melakukan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, tentu saja dalam kepemimpinannya terhadap hambatan yang harus dilalui, seperti persepsi masyarakat yang masih berparadigma patriarki, minimnya partisipasi penduduk desa, serta fasilitas yang kurang memadai.

Faktor lingkungan sosial dan budaya seringkali menghambat perkembangan dan kemajuan yang selalu diupayakan oleh perempuan. Persepsi masyarakat terhadap perempuan menyebabkan program

pembangunan dan pemberdayaan tidak mampu berjalan dengan optimal. Dengan atribut natural seorang perempuan yang irasional, emosional, dan sensitif bukan berarti seluruh perempuan tidak mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan mengayomi. Justru hal itu harus dibantah oleh pemimpin perempuan dengan implikasi-implikasi nyata untuk kebaikan masyarakat desa. Dalam penelitian Nursholikhah (2016) dijelaskan bahwa pemimpin perempuan di desa seringkali terhambat oleh stigma masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, masyarakat akan menerimanya apabila kepemimpinan perempuan memiliki hasil dan kontribusi yang nyata. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin dengan orientasi pembangunan yang nyata, misionaris, dan demokratis.

Pembangunan desa akan berhasil apabila pemimpin desa dapat memberikan pelayanan yang optimal, peka terhadap kritik dan saran, ramah, solutif, serta saling menjalin kepercayaan kepada masyarakat dan perangkat desa lainnya. Untuk menghasilkan sebuah kemajuan dan perubahan ke arah yang positif, tentu tidak akan terlepas dari kerja sama antar komponen masyarakat desa. Penelitian Hanani (2017) diungkapkan bahwa kesadaran perempuan menjadi faktor yang paling mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam aspek politik dan kepemimpinan. Kesadaran terhadap kepemimpinan perempuan dalam aspek politik dan pemerintahan akan berhasil apabila didukung dengan sistem sosial masyarakat yang berkeadilan pada kesetaraan gender. Pendidikan rendah bukan menjadi penghalang partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Namun, rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan. Pemberdayaan diri dan perempuan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan agar dapat berkiprah di ranah politik dan pemerintahan. Sebuah perubahan tidak akan berhasil apabila tidak ada upaya yang serius dalam mereduksi hambatan-hambatan yang terjadi.

### **Kedudukan dan Peran Perempuan Desa pada Aspek Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat desa. Pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa yang tertinggal. Namun, keinginan untuk menggapai masa depan oleh masyarakat desa masih sangat minim. Masyarakat desa terutama anak-anak dan perempuan di daerah yang rawan kemiskinan cenderung memiliki keinginan yang rendah untuk mengenyam pendidikan dan mendapat pekerjaan (Desky, 2022). Persepsi masyarakat yang cenderung masih mengadopsi budaya tradisional menyebabkan pendidikan perempuan sering dikesampingkan.

Dalam penelitiannya, Incing (et al., 2013) mengemukakan bahwa kesenjangan pendidikan perempuan di desa benar adanya. Laki-laki lebih berpotensi untuk mendapatkan pendidikan yang layak daripada perempuan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, lingkungan, persepsi, serta fasilitas pendidikan yang minim. Kesenjangan pendidikan perempuan di desa akan berdampak pada pembangunan desa dan masyarakat itu sendiri. Penelitiannya menyarankan pemerintah dan instansi di desa agar dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, memberikan fasilitas yang layak, meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta memberikan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian Wijayanti



& Jatiningsih (2021) yang menjelaskan bahwa adanya kecenderungan pendidikan perempuan dikesampingkan dan diarahkan untuk menikah ataupun bekerja. Hal ini terjadi di lingkungan keluarga miskin yang menganggap pendidikan perempuan sebagai pemborosan dan risiko yang lain. Namun, bagi keluarga kaya, pendidikan perempuan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunan, dan pemahaman akan pentingnya pendidikan.

Realitas kesenjangan pendidikan ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya, sehingga perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Penelitian Nabila & Umro (2020) dijelaskan bahwa perempuan desa dominan lulusan pesantren dan jenjang Sekolah Dasar (SD) terlebih pada perempuan kelahiran '70an hingga '80an. Beberapa masyarakat desa masih berkiblat pada budaya patriarki yang menganggap kodrat perempuan hanya di dapur dan mengurus keluarga. Namun, seiring berkembangnya zaman, pemikiran yang demikian semakin bergeser. Masyarakat memandang perempuan juga layak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya agar dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya di tempat ia tinggal. Selain itu, perempuan berpendidikan tinggi akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang cemerlang. Perempuan berpendidikan dapat mendidik anaknya sebagai mungkin serta mengangkat perekonomian keluarga.

Dalam penelitiannya, Basrowi & Juariyah (2010) mengungkapkan bahwa anak perempuan desa memilih untuk mengikuti kursus dan pelatihan agar dapat langsung bekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Banyaknya masyarakat desa yang tidak sekolah atau hanya lulus pada tingkat pendidikan dasar menandakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa. Rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat desa juga disebabkan oleh rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga. Pemerintah dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberi modal dan membuka lapangan pekerjaan di desa, mengedukasi masyarakat yang memiliki pendidikan rendah agar dapat termotivasi untuk mengenyam pendidikan yang layak, serta membangun fasilitas pendidikan di desa yang memadai.

Rendahnya pendidikan pada perempuan menandakan bahwa kehidupan perempuan yang masih belum sejahtera. Keadaan sosial dan budaya menempatkan kedudukan dan peran perempuan hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga dan istri. Dengan demikian, mobilitas sosial perempuan akan terus terhambat jika tidak ada perubahan yang mampu menggeser kedudukan perempuan agar setara dengan laki-laki. Dalam penelitiannya, Sujarwo (et al., 2017) mengungkapkan bahwa pendidikan perempuan desa dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan perempuan berbasis komunitas. Model pemberdayaan pendidikan perempuan berbasis komunitas wirausaha jasa layanan kuliner telah memberikan dampak positif bagi perempuan di desa, yakni memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan perempuan di dalam komunitas kuliner. Selain itu, melalui beberapa tahapan sosialisasi, pelaksanaan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi pelaksanaan dapat menambah motivasi perempuan untuk melakukan jasa kuliner, sehingga lebih terampil dan produktif dalam mengelola usaha dan mampu memberikan layanan yang prima bagi konsumen dengan menyusun SOP yang ada. Pemberdayaan ini merupakan bagian upaya untuk memobilisasi peran perempuan di desa agar dapat memiliki peran yang optimal dalam menopang perekonomian keluarga dan masyarakat.



Perkembangan zaman dan teknologi telah menuntun perempuan desa untuk menyejahterakan dirinya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya pendidikan perempuan mulai terlihat, dengan keinginan untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi perempuan desa yang terus berorientasi pada pengarusutamaan gender (Siregar, 2018). Namun, kesadaran dan keinginan masyarakat desa masih sering terhambat oleh faktor ekonomi.

### **Kedudukan dan Peran Perempuan Desa pada Aspek Ekonomi dan Keluarga**

Peran perempuan dalam sistem kerja keluarga yang berorientasi pada budaya patriarki hanya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus suami serta anak. Perempuan lebih dipercaya untuk berkiprah di ranah domestik daripada di ranah publik, sebab dengan atribut natural yang dibawa oleh perempuan dianggap lebih tepat untuk hanya bekerja di rumah, dapur, dan kamar. Laki-laki dipercaya untuk berkiprah di ranah publik, sebab laki-laki dianggap sebagai manusia yang rasional, pekerja keras, dan karakteristik yang mendukungnya untuk dapat mengembangkan potensinya di dalam ruang kerja. Namun, seiring berkembangnya zaman dan siklus perekonomian keluarga yang dinamis terus mendorong perempuan untuk dapat berkiprah di ranah publik, seperti mencari nafkah. Penelitian Zid & Alkhudri (2016) dikemukakan bahwa peranan perempuan yang bekerja sebagai nelayan juga ikut serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Selain menjadi ibu rumah tangga, perempuan desa juga bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. Peranan perempuan dalam ekonomi keluarga menjadi penting ketika pekerjaan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Pekerjaan-pekerjaan di masyarakat desa juga dirasakan oleh anak-anak. Anak perempuan diajarkan untuk mencari nafkah dengan berjualan, sedangkan anak laki-laki diajarkan untuk mencari nafkah dengan melaut. Hal ini sebenarnya juga akan memperburuk kualitas pendidikan anak yang berimplikasi pada kemunduran masyarakat desa dari segi kualitas sumber daya manusia. Peranan perempuan dalam ranah domestik dan publik merupakan bagian dari peran ganda perempuan sebagai strategi adaptasi ekologis untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2012) yang menemukan bahwa adanya peran ganda yang terjadi dalam kehidupan perempuan desa yang bekerja sebagai pemetik teh. Namun, keterlibatannya di dalam sistem kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian keluarga karena rendahnya upah yang diberikan.

Kemandirian perempuan di dalam lingkup kerja publik menjadikan perempuan juga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di keluarga, serta mendorong masyarakat untuk tidak bersikap diskriminatif. Dalam penelitian, Tindangen (et al., 2020) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan perempuan desa bekerja di sektor pertanian, perkebunan, atau menjadi nelayan, antara lain (1) perekonomian keluarga rendah, (2) pendidikan yang rendah, (3) serta kebiasaan sosial budaya masyarakat sekitar yang sudah mendarah daging. Biaya hidup yang tinggi dan pemberian upah yang minim menyebabkan keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk menopang perekonomian keluarga. Perempuan desa mencari nafkah untuk menyejahterakan kehidupan keluarga dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitar.

Rendahnya pendidikan perempuan desa menyebabkan terhambatnya mobilitas sosial perempuan di wilayah yang lebih luas. Dalam penelitiannya, Sahusilawane (2019) menjelaskan eksistensi dan peran perempuan sebagai pencari nafkah tampak terlihat, meskipun pekerjaan di ranah publik begitu berat dengan membutuhkan kekuatan, kesabaran, kecekatan, kewaspadaan, serta keberanian. Penelitiannya juga menggambarkan peran ganda seorang perempuan desa sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Kontribusi perempuan desa juga membantu para suami untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Potensi sumber daya alam merupakan salah satu anugerah bagi perempuan desa untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan keluarga. Lebih jauh, dalam penelitian Vibriyanti (2015) dikemukakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, pengrajin gerabah misalnya, telah mengalami transformasi menjadi komoditas pasar hingga ekspor ke berbagai negara yang sebelumnya hanya sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Perubahan sosial ekonomi yang terjadi juga disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agenda pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan harus tetap diperkuat. Implikasi nyata yang terjadi ialah adanya sosok perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam pemberdayaan perempuan di desa. Pemberdayaan perempuan juga akan berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Peran dan kedudukan perempuan desa tidak lagi dapat dikesampingkan dengan kontribusi nyatanya bagi perekonomian keluarga. Perempuan sebagai manusia pekerja domestik dinilai sebagai wacana yang usang karena secara realitanya banyak perempuan telah mengambil bagian penting di ranah produktif. Pada masa mendatang, diharapkan peran perempuan di sektor publik dapat meluas hingga ke tempat strategis seperti di sektor formal pemerintahan, sehingga kesejahteraan keluarga dapat terwujud (Tuwu, 2018).

### **Kedudukan dan Peran Perempuan Desa pada Aspek Sosial-Budaya**

Kompleksitas peran perempuan telah menandakan bahwa perempuan bukan hanya sebagai pelengkap dan pendamping laki-laki. Peran perempuan sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa. Perempuan memiliki kedudukan dan peran penting dalam pengembangan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menopang perekonomian keluarga, hingga mengembangkan budaya dan tradisi desa. Perempuan desa juga memiliki etos kerja yang tinggi, seorang pendidik anak, pengelola rumah tangga, pencari nafkah untuk menopang perekonomian keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyelamatkan hutang keluarga, serta menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga dengan menambah penghasilan melalui bekerja (Tuwu et al., 2020).

Peran dan kedudukan perempuan tidak dapat dianggap sebelah mata di dalam dimensi feminisme. Perempuan desa juga memiliki peran penting dalam membentuk keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Lebih jauh dari itu, perempuan desa juga memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian tradisi. Penelitian Setyowati & Hanif (2014) ditemukan keberadaan yang penting seorang perempuan dalam tradisi upacara bersih desa. Meskipun peran perempuan tidak setara dengan laki-laki, setidaknya perempuan memiliki andil penting dalam pelaksanaan tradisi dan pengembangan budaya. Peran perempuan dalam pelaksanaan tradisi upacara bersih desa adalah sebagai

memenuhi kebutuhan makanan dan pelengkap hiburan masyarakat. Kedudukan perempuan masih ditempatkan di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan berkaitan dengan hal dapur. Perempuan desa juga masih ditempatkan dalam peran pelengkap dan penghibur, sehingga ada kecenderungan objektivitas terhadap seorang perempuan.

Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Wina & Habsari (2017) yang melihat tugas perempuan dalam aspek sosial-budaya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak lauk, mempersiapkan bahan-bahan serta sebagai pelengkap dalam hiburan masyarakat seperti menari dan menyanyi. Namun, dalam pelaksanaan tradisi, perempuan juga didorong untuk hidup benar dan baik, jujur, sabar, ikhlas, dan terus bersemangat. Penelitian Yansa (et al., 2016) dijelaskan bahwa tradisi juga menentukan kedudukan dan status sosial seorang perempuan. Kedudukan dan status sosial perempuan ditentukan melalui garis keturunan, status ekonomi, dan hal-hal materil yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Hal-hal materil dalam budaya dan tradisi masyarakat mengandung nilai sosial, kepribadian, pengetahuan, dan religiusitas seorang perempuan.

Seorang perempuan di mata masyarakat yang masih mengadopsi budaya tradisional cenderung mengisolasi ruang gerak perempuan, membatasi kebebasan dengan dalih kebudayaan turun-temurun yang harus dipercaya dan dilestarikan. Kecenderungan masyarakat desa seperti ini akan terus menempatkan perempuan dalam kedudukan yang rendah, sosialisasi tradisional mengenai gender akan memperluas budaya dan sistem patriarki. Keterbatasan ruang gerak perempuan merupakan salah satu bentuk rendahnya pemahaman dan kepekaan seluruh lapisan masyarakat mengenai kesetaraan gender (Rosdiana, 2015). Pemberdayaan perempuan dan penghapusan stigma terhadap perempuan akan mewujudkan pembangunan desa yang optimal dengan berorientasi pada pengarusutamaan gender.

Perempuan juga memiliki peran dalam penyebaran informasi dan proses pelaksanaan budaya. Jaringan komunikasi terhadap peran perempuan akan mengkoneksikan kedudukan dan derajat perempuan dalam sistem sosial masyarakat (Gustina et al., 2008). Perempuan memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial dan pelestarian budaya melalui kontribusinya dalam pelaksanaan tradisi masyarakat desa, tetapi kedudukan perempuan di dalam hubungan masyarakat desa masih cenderung termarginalkan sebagai peran pendamping dan pelengkap dalam sistem sosial yang masih mengadopsi budaya-budaya tradisional.

## **Simpulan**


Kedudukan dan peran perempuan di dalam kehidupan masyarakat desa telah mengalami transformasi pada aspek politik, pendidikan, ekonomi dan keluarga, maupun sosial dan budaya. Kedudukan dan peran perempuan desa tidak lagi dapat dimarginalkan dengan kekuasaan dan dominasi laki-laki. Transformasi tersebut kemungkinan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah menuntun perempuan menuju derajat yang setara di dalam sistem sosial masyarakat desa, meskipun faktor ekonomi dan budaya masih menghambat mobilitas perempuan di dalam hubungan sosial masyarakat desa. Selain itu, faktor persepsi masyarakat dan keinginan perempuan untuk melakukan perubahan dan mobilisasi merupakan faktor penting dalam menggeser kedudukan


dan peran perempuan desa. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan desa melalui pemberdayaan perempuan, sosialisasi dan edukasi mengenai kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, memperluas lapangan pekerjaan, dan meringankan biaya hidup serta biaya pendidikan di desa.

Temuan tersebut sejalan dengan hakikat perempuan sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk bebas berekspresi, berpendapat, mengembangkan potensi, dan lain-lain. Temuan tersebut hanya berdasarkan studi literatur, diharapkan ada kajian lain yang didasarkan penelitian empiris baik dengan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, diharapkan ada studi yang dapat membuktikan tentang peran penting perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menuntun perempuan desa menuju derajat yang setara dengan laki-laki, serta bagaimana kontribusi dan upaya pemerintahan desa dalam mereduksi marginalisasi perempuan.

## ID ORCID

Muhammad Falih Iqbal:  <https://orcid.org/0009-0006-6312-6761>

Sugeng Harianto:  <https://orcid.org/0000-0003-3778-2096>

Pambudi Handoyo:  <https://orcid.org/0009-0006-0890-9595>

## Daftar Pustaka

- Basrowi, & Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(1), 58–81.
- BPS. (2022). *Statistik Politik 2022*. Jakarta: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darmi, T. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 21–27. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.48>
- Desky, A. F. (2022). *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Medan.
- Emanratu, P. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi*, 13(25), 1–8.
- Fitriani, A. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal TAPIS: Jurnal Terapung Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1–24. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/845>
- Gustina, A., Hubeis, A. V. S., & Riyanto, S. (2008). Jaringan Komunikasi Dan Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Budaya Rudat (Studi Pada Masyarakat Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Lampung Selatan). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 6(1), 72–89.
- Hanani, S. (2017). Keterlibatan Perempuan dalam Kepemimpinan Publik: Studi Kepemimpinan Ketua RT Perempuan di Desa Dendun Kepulauan Riau. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 79–

92. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.158>

- Incing, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013). Kesenjangan Gender (Perempuan) Dalam Mendapatkan Pendidikan Pada Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 38–40.
- Iqbal, M. F., & Harianto, S. (2022). Prasangka, Ketidaksetaraan, dan Diskriminasi Gender dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya : Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx. *JIIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 187–199.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>
- KPPPA. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kusumawati, Y. (2012). Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 157–167. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2411>
- Manembu, A. E. (2018). Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 1–28.
- Mustangin, M. (2017). Perubahan Iklim dan Aksi Menghadapi Dampaknya : Ditinjau dari Peran Serta Perempuan Desa Pagerwangi. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 80–89.
- Nabila, F. S., & Umro, J. (2020). PENDIDIKAN TINGGI UNTUK KAUM PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 136–148.
- Nursholikhah, I. (2016). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.22219/jch.v1i2.10623>
- Patty, A. N., Martini, R., & Hidayat, N. (2022). Pengaruh Transformasi Peran Perempuan Dan Sensitivitas Gender Terhadap Perilaku Memilih Buruh Perempuan Plasma Pada Pemilihan Kepala Daerah Purbalingga 2020. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 282–289.
- Rosdiana, W. (2015). Analisis Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). *JKMP: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 117–132.
- Sahusilawane, A. M. (2019). Perempuan dan Usaha Ternak Domba di Desa Purpura Kecamatan Kisar Utara. *AGRILAN: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 7(3), 265–277.
- Saputra, K., & Azmi, A. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Studi Kasus di Desa Maliki Air, Kota Sungai Penuh, Jambi). *Journal of Civic Education*, 4(1), 57–65. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.464>
- Setyowati, A., & Hanif, M. (2014). Peran Perempuan Dalam Tradisi Upacara Bersih Desa (Studi Kasus di Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4(1), 1–21.
- Siregar, S. (2018). Persepsi Orangtua Tentang Pendidikan Tinggi Bagi Anak Perempuan di Desa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2(2), 171–189.

- Sujarwo, Trisanti, & Santi, F. U. (2017). Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Desa Wisata Melalui Pendidikan Berbasis Komunitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(1), 75–85. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Tindangen, M., Engka, D. S. M., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Ilmu Berkah Efisiensi*, 20(3), 79–87.
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63–76. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>
- Tuwu, D., Hartia, & Bahtiar. (2020). Perempuan Penenun: Dari Budaya Kerja Hingga Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(3), 283–298. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i3.901>
- Utaminingsih, A., Sabariman, H., & Riniwati, H. (2020). Representasi Feminisme pada Kepemimpinan Perempuan di Madura (Studi Keberhasilan Kepala Desa Perempuan Menjadikan Desa Bunder Sebagai Desa Swakarya dan Desa Swasembada). *Kafa'Ah Journal*, 10(2), 173–186.
- Vibriyanti, D. (2015). Peran Kaum Perempuan Dalam Industri Kerajinan Gerabah Di Desa Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 17(2), 117–129. <https://doi.org/10.25077/jantro.v17i2.38>
- Wijayanti, M., & Jatningsih, O. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Gumeng Kabupaten Mojokerto Terhadap Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan. *JCMS: Journal of Civics and Moral Studies*, 6(2), 47–63.
- Wina, P., & Habsari, N. T. (2017). Peran Perempuan Dayak Kanayatn Dalam Tradisi Upacara Naik Dango (Studi di Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Kalimantan Barat). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(1), 104–126.
- Wula, H. V. M., & Anggraini, T. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 201–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4309>
- Yansa, H., Basuki, Y., Yusuf, M., & Perkasa, W. A. (2016). Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *PENA: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh*, 3(2), 524–535.
- Zid, M., & Alkhudri, A. T. (2016). *Sosiologi Pedesaan : Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.